

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN**

(Studi Kasus Pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Bandung)

Oleh :

Silviana Agustami

(Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis UPI)

Imam Agus Suintri

Abstract

This study aims to (1) determine the implementation of SAK ETAP at BPR in the Bandung city (2) determine the quality of the financial reports of BPR in the Bandung city, and (3) determine the effect of the implementation of SAK ETAP to quality financial reports on BPR in Bandung city. In this study, researchers used primary data for variable implementation of SAK ETAP and the quality of financial reporting through questionnaires distributed to 11 BPR in the Bandung city. The method used in this research is descriptive method verikatif. The statistical analysis tools in this study using Spearman rank correlation to determine the direction and strength of the relationship between the two variables, while the coefficient of determination is used to determine the ability of the independent variable (X) in influencing the dependent variable (Y). These results indicate (1) the implementation of SAK ETAP at BPR in the Bandung city in general has been implemented adequately (2) BPR in the Bandung city has been preparing and presenting the financial statements sufficient to satisfy the elements of relevant, reliable, able to comparable, and understandable (3) the implementation of SAK ETAP moderate effect on the quality of the financial reports of BPR in the Bandung city, amounting to 0.587. Based on the calculation of the coefficient of determination SAK ETAP implementation contribute to or influence by 34.5%% of the quality of financial reporting at BPR in the Bandung city, while the remaining 65.5% was contributed by other factors not examined.

Keywords : Application of SAK ETAP, Quality of Financial Reports, Bank Perkreditan Rakyat

Pendahuluan

Dalam sistem perbankan di Indonesia, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memiliki peran yang penting, yaitu memberikan pelayanan perbankan kepada usaha kecil atau usaha mikro dan sektor informal, terutama di daerah pedesaan. Dengan membantu dalam memberikan pelayanan perbankan khususnya dalam pemberian pinjaman untuk menciptakan pekerjaan mandiri kepada rakyat kecil yang bekerja dalam sektor informal di kota maupun di daerah pedesaan, BPR berperan dalam membantu menciptakan lapangan kerja baru, pemerataan kesempatan berusaha dan pemerataan pendapatan.

Di Indonesia, BPR diatur dalam Undang-Undang (UU) nomor 10 tahun 1998, UU ini dibuat untuk menggantikan UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dalam UU tersebut BPR didefinisikan sebagai “Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

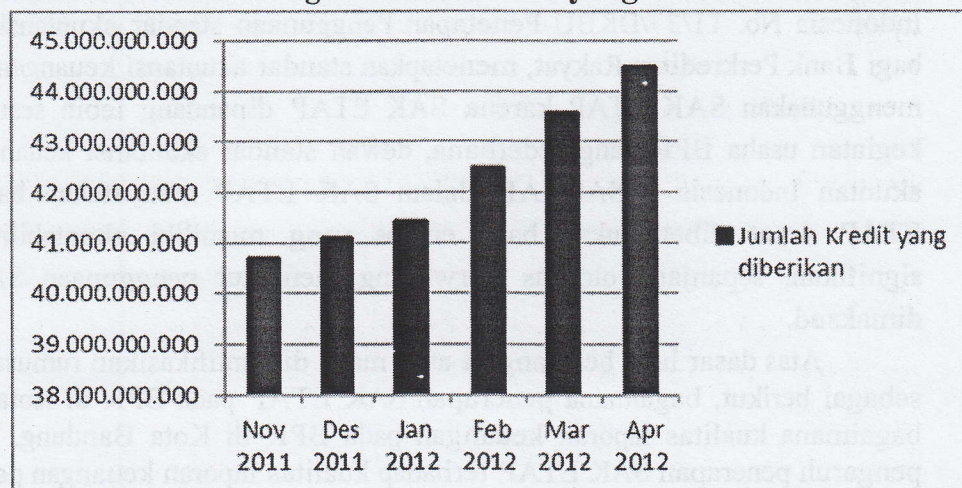
Tabel 1.1 Penyaluran Kredit oleh BPR

No	Kredit yang diberikan	Periode
1	40.680.858.773	November 2011
2	41.099.515.666	Desember 2011
3	41.424.051.429	Januari 2012
4	42.484.760.843	Februari 2012
5	43.557.413.190	Maret 2012
6	44.472.354.714	April 2012

(Sumber : www.bi.go.id)

Berdasarkan tabel 1.1 tentang penyaluran kredit oleh BPR dapat diketahui bagaimana BPR memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia. Dari besarnya jumlah kredit yang diberikan, dapat diketahui bahwa BPR memiliki peran dalam mengembangkan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mengingat BPR yang fokus dalam melayani UMKM. Untuk lebih jelasnya perkembangan jumlah kredit yang diberikan oleh BPR dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.1 Perkembangan Jumlah Kredit yang diberikan oleh BPR



(Sumber : www.bi.go.id)

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa jumlah kredit yang diberikan oleh BPR selalu mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut membuktikan pentingnya peranan BPR dalam menyokong usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pentingnya peranan BPR tersebut harus diimbangi dengan kinerja dari BPR itu sendiri. Maka dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan BPR dan penyusunan laporan keuangan yang relevan, komprehensif, andal dan dapat diperbandingkan, BPR wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang relevan bagi BPR. Namun pada kenyataannya BPR belum memiliki standar akuntansi keuangan yang relevan. Standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR selama ini adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 31 tentang Akuntansi Perbankan yang berlaku bagi seluruh perbankan. Pernyataan ini berlaku efektif selambat-lambatnya untuk penyusunan laporan keuangan mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1993. Pada tanggal 1 Januari 2010, PSAK 31 dicabut dan digantikan dengan PSAK 50 Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan (PSAK 50) dan PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (PSAK 55).

Dengan diberlakukannya PSAK 50 Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan (PSAK 50) dan PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (PSAK 55), maka standar akuntansi bagi perbankan mengacu pada PSAK yang berlaku. Namun penerapan PSAK 50 dan PSAK 55 bagi BPR dipandang masih tidak sesuai dengan karakteristik operasional BPR yang masih sederhana jika dibandingkan dengan Bank Umum. Selain kegiatan operasional yang sederhana, alasan lain adalah diperlukannya biaya yang besar dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh maka BPR memerlukan standar akuntansi keuangan yang sesuai.

Berdasarkan hal tersebut, maka Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/37/DKBU-Penetapan Penggunaan standar akuntansi keuangan bagi Bank Perkreditan Rakyat, menetapkan standar akuntansi keuangan bagi BPR menggunakan SAK ETAP karena SAK ETAP dipandang lebih sesuai dengan kegiatan usaha BPR yang sederhana, dewan standar akuntansi keuangan ikatan akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dalam SAK ETAP menyatakan bahwa SAK ETAP dapat diberlakukan bagi entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan, sepanjang otoritas berwenang mengatur penggunaan SAK ETAP dimaksud.

Atas dasar latar belakang di atas, maka diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut, bagaimana penerapan SAK ETAP pada BPR di Kota Bandung, bagaimana kualitas laporan keuangan pada BPR di Kota Bandung, bagaimana pengaruh penerapan SAK ETAP terhadap kualitas laporan keuangan pada BPR di Kota Bandung.

Kajian Pustaka

Tuntutan untuk meningkatkan transparansi kondisi keuangan dan penyusunan laporan keuangan yang relevan, komprehensif, andal dan dapat

diperbandingkan membuat Bank Perkreditan Rakyat harus menggunakan Standar Akuntansi Keuangan yang relevan dengan kegiatan usahanya. Hal ini sesuai dengan teori agensi dimana prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (*prinsipal*) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (*agensi*) yaitu manajer. Dalam hal ini BPR sebagai pihak *agen* harus dapat menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada investor (*principal*).

Bank Indonesia telah menetapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sebagai Standar Akuntansi Keuangan yang dituangkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 11/37/DKBU/2009 Penetapan Penggunaan standar akuntansi keuangan bagi Bank Perkreditan Rakyat. Penetapan SAK ETAP tersebut merupakan keseriusan Bank Indonesia dalam meningkatkan transparansi kondisi keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan penyusunan laporan keuangan yang relevan, komprehensif, andal dan dapat diperbandingkan.

SAK ETAP itu sendiri sebenarnya diperuntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik. Namun entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP, jika otoritas yang berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP.

Tujuan dari laporan keuangan pada umumnya adalah untuk memberikan informasi mengenai keuangan perusahaan kepada para pengambil keputusan. Oleh sebab itu informasi yang dihasilkan oleh laporan keuangan haruslah berkualitas, tidak menyesatkan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah standar yang digunakan. Hal tersebut didukung oleh tujuan dari standar akuntansi yaitu menghasilkan informasi keuangan yang diharapkan mempunyai sifat jelas, konsisten, terpercaya dan dapat diperbandingkan (Belkaoui, 1985). Dengan diterapkannya SAK ETAP pada BPR, diharapkan kualitas laporan keuangan yang disusunnya akan meningkat. Untuk menilai kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari karakteristik kualitatif yang harus ada dalam laporan keuangan. Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi pengguna di masa lalu.

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Agar bermanfaat, informasi juga harus

andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian yang jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Pengguna harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relative. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda.

Metode Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif verifikatif. Sementara untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dilakukan penelitian lapangan yaitu melalui kuesioner, wawancara bila diperlukan dan arsip data lain yang terkait. Kuesioner dalam penelitian ini disusun dengan menggunakan skala linkert dengan skala data ordinal. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kota Bandung. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Convenience Sampling*. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji validitas dan reliabilitas data, korelasi *rank spearman*, uji koefisien determinasi.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa penerapan SAK ETAP memberikan kontribusi atau pengaruh sebesar 34,5% terhadap kualitas laporan keuangan pada BPR di Kota Bandung. Sementara sisanya sebesar 65,5% merupakan kontribusi dari faktor-faktor lain yang tidak diteliti seperti pengendalian internal atau sistem informasi akuntansi. Setelah diketahui bahwa hubungan antara penerapan SAK ETAP dengan kualitas laporan keuangan adalah sedang. Arah hubungan positif antara penerapan SAK ETAP dengan kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa semakin baik penerapan SAK ETAP akan diikuti dengan peningkatan kualitas laporan keuangan. Hasil tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Belkaoui (1985) bahwa tujuan dari standar akuntansi yaitu menghasilkan informasi keuangan yang diharapkan mempunyai sifat jelas, konsisten dan dapat diperbandingkan.

Simpulan

1. Penerapan SAK ETAP pada BPR di Kota Bandung pada umumnya telah dilaksanakan secara memadai. Hal ini sesuai dengan hasil perhitungan atas jawaban responden dengan dimensi pemahaman perbedaan PSAK dengan SAK ETAP.
2. BPR di Kota Bandung telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara memadai dengan memenuhi unsur-unsur relevan, handal, dapat

dibandingkan, dan dapat dipahami. Berdasarkan hasil perhitungan indikator handal memperoleh skor terendah.

3. Penerapan SAK ETAP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada BPR di Kota Bandung. Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi penerapan SAK ETAP memberikan kontribusi atau pengaruh sebesar 34,5% terhadap kualitas laporan keuangan pada BPR di Kota Bandung, Sementara sisanya sebesar 65,5% merupakan kontribusi dari faktor-faktor lain yang tidak diteliti seperti pengendalian internal ataupun sistem informasi akuntansi yang diterapkan.

Saran

1. Secara umum penerapan SAK ETAP pada BPR di Kota Bandung sudah baik, namun tidak begitu dalam hal pengungkapan modal pada catatan atas laporan keuangan, diketahui pengungkapan modal pada catatan atas laporan keuangan mendapatkan skor 61,8% yang masuk dalam kategori cukup baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan modal pada catatan atas laporan keuangan masih dikategorikan cukup baik, sehingga hal ini harus menjadi fokus perhatian bagi BPR di Kota Bandung. BPR dapat menjalin kerjasama dengan pihak eksternal seperti konsultan atau dengan perguruan tinggi untuk memperbaiki penerapan SAK ETAP yang masih dirasakan kurang atau dengan cara lain yaitu mengikutsertakan staf dalam pelatihan-pelatihan yang terkait dengan penerapan SAK ETAP.
2. Bagi penelitian selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian yang serupa dapat melakukan penelitian lanjutan dengan memperluas wilayah penelitian tidak hanya pada BPR di Kota Bandung. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan, seperti pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi.

Daftar Pustaka

- Abdul, Hakim.(2010). *Statistika Deskriptif*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Hardanto, Sri Sulad. (2006). *Manajemen Resiko Bagi Bank Umum*. Jakarta : PT Media Elex Komputindo.
- Husein, Umar. (2008). *Desain Penelitian Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada
- Husein Umar. (2008). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis edisi kedua*. Jakarta: PT RajaGrafindoPersada.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Jakarta : DSAK IAI
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2007). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat
- J. Supranto. (2007). *Teknik Sampling Untuk Survey & Eksperimen*. Jakarta: RinekaCipta
- Jonathan, Sarwono.(2006). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: GrahaIlmu
- Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Rajawali Pers.

- Kieso Donald E, et.al. (2002). *Akuntansi Intermediate*. Jakarta: Erlangga. Alih Bahasa: Emil Salim. Editor: YatiSumiharti.
- Kieso Donald E, et.al. (2008). *Accounting Principles*. Asia : John Wiley & Sons
- Riduwan.(2002). *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Sofyan, Syafri Harahap. (2008). *Teori Akuntansi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suharsimi, Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. RinekaCipta
- Sugiyono.(2004). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sugiyono.(2005). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono.(2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/37/DKBU Tentang Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- Suyatno, Thomas.,et.al. (2007). *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Uma, Sekaran. (2006). *Research Methods For Business Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: SalembaEmpat.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Usman, Rachmadi. (2003). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wibisono, Dermawan. (2003). *Riset Bisnis*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka utama